Dukungan Komitmen Good Governance untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Image not found or type unknown

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.02.04/7/SET.M.EKON.3/01/2026

Dukungan Komitmen *Good Governance* untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Jakarta, 12 Januari 2026

Pemerintah terus berkomitmen mengedepankan penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) serta implementasi pengendalian internal pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan dan pelaksanaan anggaran secara akuntabel.

“Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor eksternal diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan dengan peningkatan kualitas pengelolaan daripada keuangan negara, meningkatnya penerimaan negara, kemudian efektivitas pengeluaran dan belanja negara, serta pencegahan dan deteksi penyalahgunaan keuangan negara,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin (12/01).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga memaparkan terkait perkembangan indikator makro ekonomi terkini. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia diprediksi tetap solid dengan kemungkinan resesi salah satu yang paling rendah dibanding negara lain. Kinerja perekonomian nasional hingga akhir tahun 2025 tetap menunjukkan fundamental yang kuat dan resiliensi, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terjaga di kisaran 5% selama tujuh tahun terakhir.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara aktif menyalurkan stimulus fiskal senilai total Rp110,7 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang digelontorkan secara bertahapdi setiap kuartal. Stimulus tersebut diperkuat dengan berbagai program non-APBN seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Saja (BINA), dan Every Purchase is Cheap (EPIC Sale).

Memasuki tahun 2026, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dengan mengandalkan sejumlah sektor prioritas, antara lain ketahanan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, kesehatan Rp244 triliun, UMKM dan Desa Rp181,8 triliun, pertahanan Rp424,8 triliun, serta investasi dan dagang Rp57,7 triliun. Pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor industri dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kemudian, untuk menghadapi era ekonomi digital, Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (AI), menginisiasi ASEAN *Digital Economic Framework Agreement*, serta memperkuat kerja sama internasional, termasuk dalam aksesi OECD dan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (EU-CEPA). Selain itu, Pemerintah juga mendorong QRIS sebagai *game changer*, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta memperbaiki iklim dan proses investasi melalui Satgas Percepatan Program

Stratetgis Pemerintah (P2SP).

“Dalam pertemuan tadi malam di Hambalang, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga mendorong pentingnya sektor industri tekstil untuk kita pertahankan karena sektor industri tekstil ini adalah yang paling terbuka untuk menghadapi perang dagang. Oleh karena itu Bapak Presiden minta agar dibuat langkah khusus dan kami sudah melakukan studi untuk mempertahankan industri tekstil di Indonesia dan dari hasil studi tersebut Indonesia berpotensi menjadi 5 pemain besar tekstil dunia karena dari segi pertumbuhan, sektor tekstil ini selalu akan dibutuhkan,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tahap awal pembentukan pendanaan untuk insentif sektor tekstil guna melengkapi *value chain* industri tekstil, dengan kebutuhan pendanaan sekitar USD6 miliar. Presiden juga menyetujui rencana untuk me-*rebuild* BUMN atau Danantara yang secara khusus akan menangani sektor tekstil. Melalui langkah tersebut, Pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekspor tekstil dari sekitar USD4 miliar menjadi USD40 miliar dalam 10 tahun ke depan, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 4 juta orang menjadi 6 juta orang, atau bertambah sekitar 2 juta tenaga kerja di sektor tekstil.

Selain itu, industri elektronik juga menjadi salah satu sektor prioritas yang mendapat perhatian khusus akibat dampak dinamika global. Pemerintah akan mendorong pengembangan kembali industri semikonduktor. Kemenko Perekonomian telah menjalin komunikasi dengan perusahaan semikonduktor global asal Inggris yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi mitra strategis Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden, Pemerintah juga akan membentuk BUMN khusus di bidang semikonduktor. Pengembangan industri ini akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, mengingat ekosistem semikonduktor berbasis pada kapabilitas SDM. Industri semikonduktor yang dikembangkan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masa depan, terutama bagi sektor otomotif, *internet of things* (IoT), komputer personal, *data center*, serta layanan komputasi awan (*cloud*). Indonesia dinilai memiliki keunggulan tersendiri karena didukung oleh pasar domestik yang besar dan merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta Direktur Jenderal PKN II BPK Nelson Ambarita. (dlt/fsr)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia